

**PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DAN KUALITAS  
PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP  
PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2010-2014**

**(Skripsi)**

Oleh  
**BENNY TIBESTRI SIALLAGAN**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

## **ABSTRACT**

### **THE EFFECT OF FISCAL DECENTRALIZATION AND THE QUALITY OF FINANCIAL GOVERNANCE OF LOCAL GOVERNMENT TO ECONOMIC GROWTH IN LAMPUNG PROVINCE IN 2010-2014**

**By**

**BENNY TIBESTRI SIALLAGAN**

This study aims to analyze the effect of Fiscal Decentralization and The Quality of Financial Governance of Local Government to economic growth in Lampung Province in 2010-2014. To see the effect together with other economic growth factors, the author used a set of control variables empirically frequently used and proven to have an impact on economic growth, namely: Initial Level of PDRB, Population Growth, Investment and Human Capital.

The analysis was performed by multiple regression analysis model using ordinary least squares (OLS) also known as the common effect model. Data used by the author is the panel data of 14 districts/cities in Lampung Province in 2010-2014. By using significance  $\alpha$  0,05, the analysis shows that fiscal decentralization provides a positive and significant effect on economic growth in Lampung Province. Furthermore, by using significance  $\alpha$  0,1, the quality of financial governance of local government has a positive effect and significant on economic growth in Lampung Province. In addition, control variables the initial level of PDRB has a negative and significant effect on economic growth, control variable investment has a positive and significant effect on economic growth, while the control variables population growth and human capital does not effect the economic growth in Lampung Province.

Keywords:

Fiscal Decentralization, The Quality of Financial Governance of Local Government, Economic Growth, Lampung Province

## ABSTRAK

### **PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2010- 2014**

Oleh

**BENNY TIBESTRI SIALLAGAN**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal dan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung pada periode 2010-2014. Untuk melihat pengaruh secara bersama-sama dengan faktor pertumbuhan ekonomi lainnya, maka digunakan seperangkat variabel kontrol yang secara empiris sering digunakan dan terbukti memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu: Level Awal Pertumbuhan PDRB, Pertumbuhan Penduduk, Investasi dan *Human Capital*.

Analisis dilakukan dengan model analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*) dengan menggunakan metode *ordinary least square* (OLS) atau dikenal juga sebagai *common effect model*. Data yang digunakan adalah data panel dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Lampung pada periode 2010-2014. Dengan menggunakan signifikansi  $\alpha$  sebesar 0,05 hasil analisis menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Selanjutnya dengan menggunakan signifikansi  $\alpha$  sebesar 0,1, kualitas pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Disamping itu, variabel kontrol level awal pertumbuhan PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, variabel kontrol investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel kontrol pertumbuhan penduduk dan *human capital* tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

Kata kunci:

Desentralisasi Fiskal, Kualitas Pengelolaan Keuangan, Pertumbuhan Ekonomi, Provinsi Lampung

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DAN KUALITAS PENGELOLAAN  
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN  
EKONOMI DI PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2010-2014

Oleh  
BENNY TIBESTRI SIALLAGAN

Skripsi  
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA EKONOMI  
pada  
Jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2016**

Judul Skripsi

: **PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL  
DAN KUALITAS PENGELOLAAN  
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI  
DI PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2010-2014**

Nama Mahasiswa

: **Benny Tibestri Siallagan**

Nomor Pokok Mahasiswa

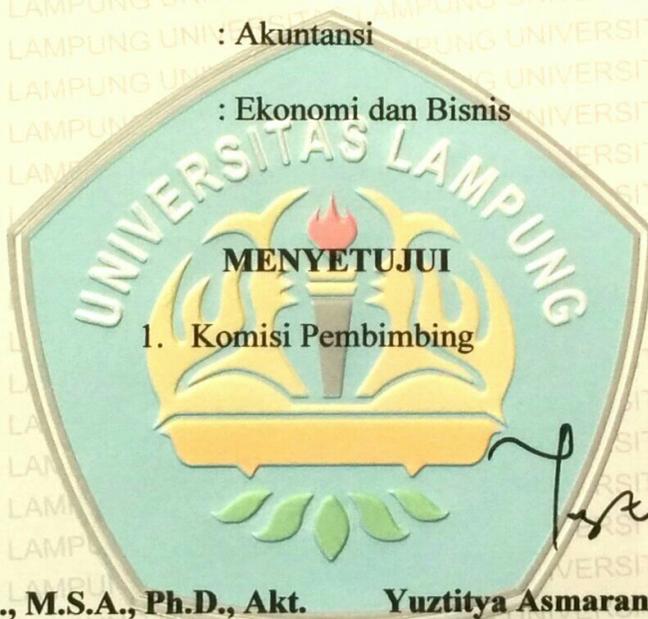
: 1411031136

Program Studi

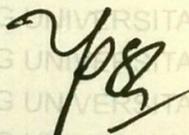
: Akuntansi

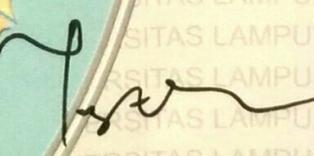
Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis



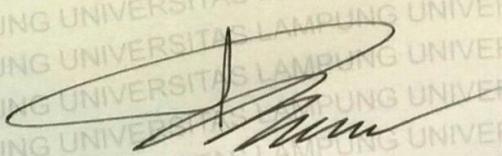
1. **Komisi Pembimbing**

  
**Yuliansyah, S.E., M.S.A., Ph.D., Akt.**  
NIP 19730723 199003 1 002

  
**Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si.**  
NIP 19801017 200512 2 002

**MENGETAHUI**

2. **Ketua Jurusan Akuntansi**

  
**Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.**  
NIP 19620612 199010 2 001

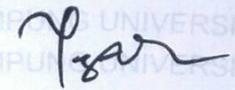
**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Yuliansyah, S.E., M.S.A., Ph.D., Akt.**



**Sekretaris : Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si.**



**Penguji Utama : Dr. Farichah, S.E., M.Si., Akt.**



**2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis**



**Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.**  
NIP 19610904 198703 1 011



**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 31 Oktober 2016**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : **Benny Tibestri Siallagan**

**NPM** : **1411031136**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung Tahun 2010-2014” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan bukan merupakan plagiarisme, pencurian hasil karya milik orang lain, ataupun hasil kerja keras orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 31 Oktober 2016

Yang Membuat Pernyataan,



Benny Tibestri Siallagan

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis lahir pada tanggal 13 Maret 1987 di Kota Pematang Siantar sebagai anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan Hotman Siallagan dan Lamria Manurung. Penulis menempuh pendidikan dasar formal di SD Negeri Inpres 091494 Tiga Balata Kabupaten Simalungun dan lulus tahun 1999, selanjutnya di SMP Negeri 1 Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun dan lulus tahun 2002 serta di SMA Negeri 1 Pematang Raya Kabupaten Simalungun dan lulus tahun 2005. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan pada Program Diploma III (D-III) Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Jakarta pada tahun 2005 dan menyelesaikan pendidikan pada tahun 2008. Pada tahun 2008, penulis mulai bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kemudian pada tahun 2010 diangkat sebagai pejabat fungsional auditor dan ditugaskan di Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu hingga tahun 2014.

Pada tahun 2014, penulis menerima beasiswa program *State Accountability Revitalization* (STAR) BPKP di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung untuk pendidikan Program Strata 1 (S-1) Jurusan Akuntansi. Pada tahun 2016, penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Lampung.

## SANWACANA

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan anugerah dan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung Tahun 2010-2014”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi S1 Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Farichah, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi sekaligus Dosen Penguji Utama atas masukan, arahan, dan nasihat yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi sekaligus Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan, nasihat, dukungan, pelajaran, pengalaman, serta pembelajaran diri yang telah diberikan.
4. Bapak Yuliansyah, S.E., M.S.A., Ph.D., Akt., selaku dosen Pembimbing Utama atas kesediaannya untuk meluangkan waktu, memberikan bimbingan,

nasihat, dukungan, pengalaman, serta pembelajaran diri selama proses penyelesaian skripsi ini.

5. Bapak Dr. Einde Evana, S.E., M.Si., Akt., selaku Pembimbing Akademik selama menjalani perkuliahan di Universitas Lampung.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan di Jurusan Akuntansi atas semua bimbingan, pengajaran, pelayanan dan bantuan yang telah diberikan selama ini.
7. Kedua orang tuaku, Hotman Siallagan dan Lamria Manurung yang selalu memberikan dukungan dan doa dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.
8. Saudara-saudaraku, Franky Siallagan, Roy Siallagan, Siska Siallagan dan Fernando Siallagan yang selalu memberikan dukungan dan doa selama ini.
9. Teman-teman seperjuangan, STAR BPKP *batch* 1 angkatan 2014; Dian Margi Putra Asmorojati, Ersya Resya Ranilhaj, Mujiyanto, Ilham Irawan Romadhoni, Rendy Bayu Adha, Irwansyah Adnansaid, Raden Hepzi Irawan, Hubert Sijabat, Janson Yanda Hutaeruk dan Toni Pebriansya, atas kebersamaan, bantuan dan dukungan selama ini.
10. Anwar Parlindungan Sinaga dan Rafael Tambunan yang selalu memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini.
11. Terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Demikianlah, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan baru bagi setiap orang yang membacanya.

Bandar Lampung, 31 Oktober 2016  
Penulis,

Benny Tibestri Siallagan

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| DAFTAR ISI .....  | i   |
| DAFTAR TABEL .....  | iii |
| DAFTAR GAMBAR .....   | iv  |
| BAB I PENDAHULUAN .....   | 1   |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....  | 1   |
| 1.2 Rumusan Masalah .....   | 7   |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....   | 8   |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....  | 8   |
| 1.4.1 Manfaat Teoritis .....  | 8   |
| 1.4.2 Manfaat Praktis .....   | 8   |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....   | 9   |
| 2.1 Landasan Teori .....  | 9   |
| 2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi .....   | 9   |
| 2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....   | 12  |
| 2.1.3 Desentralisasi Fiskal .....   | 14  |
| 2.1.4 Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah .....   | 18  |
| 2.1.5 Level Awal Pertumbuhan Ekonomi ( <i>The Initial Level of GDP</i> ) ...  | 19  |
| 2.1.6 Pertumbuhan Penduduk .....  | 21  |
| 2.1.7 Investasi .....   | 23  |
| 2.1.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....  | 24  |
| 2.1.9 Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kualitas Pengelolaan<br>Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi ..... | 26  |
| 2.1.10 Tinjauan Penelitian Terdahulu .....  | 29  |
| 2.2 Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis .....   | 33  |
| 2.2.1 Kerangka Pemikiran .....  | 33  |
| 2.2.2 Pengembangan Hipotesis .....  | 35  |
| 2.2.2.1 Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan<br>Ekonomi .....  | 35  |
| 2.2.2.2 Pengaruh Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah<br>Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi .....              | 36  |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....   | 37  |
| 3.1 Jenis dan Sumber Data .....   | 37  |
| 3.2 Populasi dan Sampel .....   | 38  |
| 3.3 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional Variabel .....   | 38  |
| 3.3.1 Variabel Dependen .....   | 38  |
| 3.3.2 Variabel Independen .....   | 39  |
| 3.3.3 Variabel Kontrol .....  | 40  |

|                                   |  |    |
|-----------------------------------|--|----|
| 3.4                               | Model Penelitian .....   | 41 |
| 3.5                               | Pemilihan Model Regresi .....  | 44 |
| 3.5.1                             | Uji Chow .....   | 45 |
| 3.5.2                             | Uji Hausman .....  | 46 |
| 3.5.3                             | Uji Lagrange Multiplier .....  | 47 |
| 3.6                               | Uji Asumsi Klasik .....  | 47 |
| 3.6.1                             | Uji Normalitas .....   | 48 |
| 3.6.2                             | Uji Multikolinieritas .....  | 48 |
| 3.6.3                             | Uji Heterokedastisitas .....   | 49 |
| 3.6.4                             | Uji Autokorelasi .....   | 49 |
| 3.7                               | Pengujian Hipotesis .....  | 50 |
| 3.7.1                             | Pengujian Koefisien Determinasi <i>R-square</i> ( $R^2$ ) .....                                      | 50 |
| 3.7.2                             | Pengujian Model Secara Keseluruhan (Uji-F) .....   | 50 |
| 3.7.3                             | Pengujian Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji-t).....  | 51 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ..... |  | 52 |
| 4.1                               | Hasil Analisis Data .....  | 52 |
| 4.1.1                             | Analisis Statistik Deskriptif .....  | 52 |
| 4.2                               | Pemilihan Model Regresi .....  | 55 |
| 4.2.1                             | Uji Chow .....   | 56 |
| 4.2.2                             | Uji Hausman .....  | 56 |
| 4.2.3                             | Uji Lagrange Multiplier .....  | 57 |
| 4.3                               | Pengujian Asumsi Klasik .....  | 58 |
| 4.3.1                             | Uji Normalitas .....   | 58 |
| 4.3.2                             | Uji Multikolinieritas .....  | 60 |
| 4.3.3                             | Uji Heterokedastisitas .....   | 60 |
| 4.3.4                             | Uji Autokorelasi .....   | 61 |
| 4.4                               | Estimasi Model Regresi Data Panel .....  | 62 |
| 4.5                               | Pengujian Hipotesis .....  | 63 |
| 4.5.1                             | Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....  | 63 |
| 4.5.2                             | Uji Model secara Keseluruhan/ Simultan (Uji-F) .....   | 64 |
| 4.5.3                             | Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji-t).....   | 65 |
| 4.6                               | Pembahasan .....   | 67 |
| 4.6.1                             | Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung .....                | 67 |
| 4.6.2                             | Pengaruh Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung ..... | 71 |
| 4.6.2                             | Pengaruh Variabel-Variabel Kontrol terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung .....            | 73 |
| BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....    |  | 77 |
| 5.1                               | Simpulan .....   | 77 |
| 5.2                               | Keterbatasan Penelitian .....  | 78 |
| 5.3                               | Saran .....  | 78 |
| DAFTAR PUSTAKA .....              |  | 80 |
| LAMPIRAN.....                     |  |    |

**DAFTAR TABEL**

|           |   |    |
|-----------|---|----|
| Tabel 4.1 | Hasil Uji Statistik Deskriptif .....                | 52 |
| Tabel 4.2 | Hasil Pengujian Chow Test .....                     | 56 |
| Tabel 4.3 | Hasil Pengujian Hausman Test .....                  | 57 |
| Tabel 4.4 | Hasil Uji Lagrange Multiplier .....                 | 58 |
| Tabel 4.5 | Matriks <i>Statistic Correlation</i> .....          | 60 |
| Tabel 4.6 | <i>Residual Absolute Glejser Test</i> .....         | 61 |
| Tabel 4.7 | Rentang Autokorelasi dengan Uji Durbin-Watson ..... | 62 |
| Tabel 4.8 | Hasil Estimasi Regresi .....                        | 63 |
| Tabel 4.9 | Hasil Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t) .....   | 65 |

**DAFTAR GAMBAR**

|            |   |    |
|------------|---|----|
| Gambar 2.1 | Kerangka Pemikiran .....  | 34 |
| Gambar 4.1 | <i>Histogram Normality Test</i> .....   | 59 |
| Gambar 4.2 | Grafik Peningkatan Total PAD.....   | 69 |
| Gambar 4.3 | Perbandingan PAD, Dana Perimbangan dan Pendapatan<br>Lainnya- yang Sah dari Seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi<br>Lampung ..... | 70 |
| Gambar 4.4 | Perbandingan Growth Berdasarkan Kategori Kualitas<br>Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah .....                               | 73 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pasca krisis keuangan dunia yang juga menimpa Indonesia pada tahun 1998, pemerintah Indonesia mengubah skema pembangunan dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi, yaitu penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan urusan daerahnya sendiri. Perubahan sistem sentralisasi menjadi desentralisasi ini berpengaruh terhadap pemerintah daerah dengan sumber daya yang dimilikinya untuk dapat melakukan pembangunan di daerahnya sendiri. Untuk mengatur hal tersebut, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pembentukan otonomi daerah ini menjadi langkah awal bagi percepatan pembangunan di daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat tidak sepenuhnya lepas tangan karena mempertimbangkan perbedaan kemampuan daerah-daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD). Brodjonegoro dan Dartanto (2003) menyatakan bahwa perbedaan kemampuan fiskal antar daerah yang dapat dilihat dari PAD suatu daerah memungkinkan terjadinya peningkatan *inequality*

atau kesenjangan antar daerah, maka masih diperlukan campur tangan pemerintah pusat untuk dapat memperbaiki kesenjangan pendapatan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi antar daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat masih memberikan bantuan dalam hal keuangan yang disebut sebagai dana perimbangan yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Pelaksanaan undang-undang tersebut telah menyebabkan perubahan yang mendasar bagi pengaturan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya di bidang administrasi pemerintahan dan keuangan, yang dikenal dengan sistem desentralisasi. Salah satu desentralisasi yang paling banyak disorot dan paling berpengaruh terhadap perkembangan daerah adalah desentralisasi fiskal yang merupakan bagian penting dari implementasi otonomi daerah. Kebijakan desentralisasi fiskal ini pada dasarnya merupakan alat atau instrumen pemerintah yang sangat penting dalam sistem perekonomian yang berguna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Adapun tujuan pelaksanaan otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar lebih baik dibandingkan sebelum otonomi daerah. Aspek pertama adalah bahwa daerah diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) atau sering disebut sebagai aspek

desentralisasi fiskal. Mardiasmo (2002) menyebutkan bahwa upaya untuk memantapkan kemandirian pemerintah daerah yang merupakan tujuan pelaksanaan otonomi daerah dapat dilakukan dengan meningkatkan pengelolaan sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga otonomi yang diberikan kepada daerah akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aspek kedua yaitu di sisi manajemen pengeluaran daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah harus lebih akuntabel dan transparan, yang tentunya menuntut daerah agar lebih efisien dan efektif dalam pengeluaran daerah.

Kedua aspek diatas dapat disebut sebagai reformasi pembiayaan atau *Financing Reform*. Sehingga penting bagi pemerintah daerah untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap kemampuan untuk mengurus pembiayaan atau belanja daerah secara mandiri dan mengelola keuangan daerahnya secara efektif serta efisien. Suatu daerah yang memiliki pendapatan asli daerah yang baik serta mengelolanya dengan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan fiskal untuk membiayai belanja daerah dengan baik sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya.

Mardiasmo (2002) mengemukakan bahwa tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Otonomi daerah pada dasarnya mengandung tiga misi utama, yaitu: (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, dan (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Dalam konteks

memajukan perekonomian daerah, menurut Mankiw (2007) salah satu indikator yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) yang dimiliki oleh daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota.

Seperti dijelaskan sebelumnya, dalam penerapan desentralisasi fiskal, pemerintah pusat tidak lepas tangan secara penuh karena masih memberikan bantuan kepada pemerintah daerah termasuk Provinsi Lampung, berupa dana perimbangan. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung tahun 2014, Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2014 menerima transfer dana dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan (realisasi) sebesar Rp1.472 milyar, sementara itu Pemerintah Provinsi Lampung memiliki pendapatan asli daerah tahun 2014 sebesar Rp2.274 milyar. Sedangkan secara keseluruhan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Lampung bila dijumlahkan pendapatan asli daerah mereka mencapai Rp1.178 milyar dan total menerima dana perimbangan (realisasi) sebesar Rp11.243 milyar. Dengan demikian dapat terlihat bahwa pendapatan asli daerah yang mampu dihasilkan oleh pemerintah kabupaten dan kota masih tergolong kecil bila dibandingkan dengan pendapatan asli daerah Provinsi, ataupun bila dibandingkan dengan dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat.

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pembangunan di daerah, desentralisasi fiskal juga perlu didukung dengan penerapan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good corporate governance*). Mardiasmo (2006) menjelaskan bahwa prinsip-prinsip dasar dari *good corporate governance* (GCG) adalah transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), responsibilitas

(*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Akuntabilitas dalam konteks sektor publik merupakan kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas serta kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada masyarakat yang memiliki hak untuk menerima pertanggungjawaban tersebut.

Salah satu permasalahan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, baik itu provinsi maupun kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pemerintahannya adalah jumlah penduduk yang tiap tahun semakin meningkat yang secara langsung juga meningkatkan jumlah pengangguran jika jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya (Todaro: 2000). Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian suatu daerah, karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Peningkatan jumlah penduduk yang tidak disertai dengan manajemen sumber daya manusia yang baik akan menimbulkan pengangguran yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Lampung pada tahun 2014 memiliki jumlah penduduk sebanyak 8.026.191 jiwa meningkat dari tahun 2013 sebanyak 7.932.100 jiwa, merupakan rangking kedua terbanyak di wilayah Sumatera, dengan tingkat laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,0119 atau 1,19%. Dari jumlah tersebut, terdapat angka pengangguran sebanyak 184.778 orang.

Dalam melakukan pembangunan di daerah, pemerintah daerah di Provinsi Lampung tentunya juga telah melakukan upaya investasi yang dapat dilihat dari belanja pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Sukirno (2006) menyatakan bahwa investasi sering disebut sebagai penanaman modal atau pembentukan modal, yang dapat diartikan sebagai pengeluaran/pembelanjaan modal untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Berdasarkan data publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), secara keseluruhan pada tahun 2014 pemerintah daerah di Provinsi Lampung yang terdiri dari pemerintah kabupaten/kota dan provinsi bila dijumlahkan telah melakukan pembentukan modal tetap bruto sebesar Rp3,99 triliun. Pembentukan modal tetap bruto ini sendiri merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk barang modal sebagai investasi, seperti untuk bangunan, jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan yang diharapkan dapat menggerakkan perekonomian di daerah dan menyerap tenaga kerja.

Menurut *United Nation Development Programme* (1990), pembinaan sumber daya manusia dapat meningkatkan modal manusia yang dapat dilihat melalui capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan data yang diperoleh dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung dan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), capaian IPM Provinsi Lampung Tahun 2014 adalah 66,42, yang masuk dalam kategori sedang secara nasional namun menduduki peringkat terendah di wilayah Sumatera. Capaian IPM tersebut masih lebih rendah dari capaian IPM secara nasional yang sebesar 68,90. Terdapat 5 kabupaten/kota yang memiliki capaian

IPM di atas rata-rata capaian IPM Provinsi, sedangkan kabupaten/kota yang memiliki capaian di bawah rata-rata capaian IPM Provinsi berjumlah 10 kabupaten/kota, dengan capaian terendah adalah Kabupaten Mesuji dengan 58,71.

Atas dasar uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai seberapa besar pengaruh desentralisasi fiskal dan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan judul **“Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung Tahun 2010-2014”**. Penelitian ini penting dilakukan untuk menjawab pertanyaan mengenai hubungan desentralisasi fiskal dan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di Provinsi Lampung. Jika ditemukan pengaruh yang positif maka pelaksanaan otonomi daerah di Provinsi Lampung telah berada di jalur yang tepat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung?
- b. Apakah kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk menguji pengaruh dari desentralisasi fiskal dan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kontribusi sebagai berikut:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi, khususnya ilmu makro ekonomi, yaitu terkait dengan desentralisasi fiskal dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pengetahuan penulis dalam melakukan suatu penelitian terutama yang berkaitan dengan desentralisasi fiskal dan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan desentralisasi fiskal dan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
- c. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan fiskal di masa yang akan datang.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi**

Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan peningkatan produksi barang dan jasa serta peningkatan kemakmuran masyarakat. Pertumbuhan ekonomi sering juga diartikan sebagai peningkatan produk domestik bruto (PDB) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Sukirno (2006) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk kepada perubahan yang bersifat kuantitatif dan dapat diukur dengan menggunakan data Produk Domestik Bruto atau pendapatan atau nilai akhir pasar dari barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan dari suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu.

Sementara itu, Todaro (2000) mengatakan bahwa terdapat 3 (tiga) komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja, serta kemajuan teknologi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah akumulasi modal berupa *human capital* dan pertumbuhan penduduk.

Akumulasi modal berupa *human capital* dapat meningkatkan modal manusia yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap angka produksi. Untuk mencapai tujuan investasi sumber daya manusia, para pelaku investasi harus bersedia mengorbankan atau mengurangi konsumsi terhadap barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka saat ini demi memperoleh kebutuhan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Peningkatan tenaga kerja berarti akan berdampak terhadap peningkatan produksi, sedangkan peningkatan terhadap pertumbuhan penduduk akan memperluas ukuran pasar domestik. Namun demikian terdapat perbedaan pendapat terkait pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja pada negara-negara berkembang. Pertanyaan yang timbul adalah terkait seberapa cepat permintaan angkatan kerja di negara-negara berkembang. Apabila permintaan angkatan kerja tidak dapat menyerap pertumbuhan penduduk, maka malah akan meningkatkan pengangguran dan meningkatkan *dependency ratio*. *Dependency ratio* merupakan perbandingan antara penduduk usia non produktif (usia 0 – 14 tahun + 65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (15 tahun – 65 tahun).

Robert Solow dari *Massachusetts Institute of Technology* (MIT) menemukan suatu teori tentang pertumbuhan ekonomi yang disebut dengan Model Pertumbuhan Solow atau *Solow Growth Model*. Mankiw (2007) menjelaskan bahwa model ini dirancang untuk menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinteraksi dalam perekonomian, serta bagaimana pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan. Dalam model tersebut, output yang dihasilkan dalam perekonomian tergantung pada persediaan

modal dan tenaga kerja melalui sebuah fungsi produksi Cobb-Douglas yang memiliki skala hasil konstan. Mankiw (2007, 184) menjelaskan dengan:

$$Y = F(K,L)$$

“Berdasar asumsi skala hasil konstan, maka dengan membagi kedua sisi persamaan dengan L (pekerja) maka dapat juga diidentifikasi bahwa output perpekerja merupakan fungsi dari modal perpekerja, yaitu  $Y/L = F(K/L,1)$ , dan selanjutnya dapat ditulis persamaan  $Y = F(K)$ , yang menggambarkan bahwa output perpekerja merupakan fungsi dari modal per pekerja.”

Persediaan modal tersebut dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena mengalami perubahan sepanjang waktu. Investasi dan depresiasi memiliki pengaruh yang paling kuat terhadap persediaan modal, dan dalam jangka panjang persediaan modal ini akan mencapai suatu tingkat modal pada kondisi mapan (*Steady state level of capital*). Adapun yang dimaksud dengan suatu tingkat modal pada kondisi mapan tersebut adalah kondisi di mana dalam perekonomian berlaku tingkat investasi sama dengan depresiasi sehingga perubahan persediaan modal ( $k$ ) dan output  $f(k)$  adalah tetap.

Model Pertumbuhan Solow juga menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Mankiw: 2007). Hal tersebut dapat terlihat dari semakin besarnya jumlah penduduk berdampak terhadap mengecilnya jumlah modal perpekerja dan rendahnya output perpekerja, sedangkan kemajuan teknologi berpengaruh terhadap peningkatan produksi melalui peningkatan efisiensi tenaga kerja. Peningkatan efisiensi tenaga kerja tersebut tercermin dalam peningkatan kemampuan masyarakat untuk berproduksi sepanjang waktu dengan menggunakan metode-metode produksi tertentu.

Supartoyo, dkk (2013) melakukan penelitian tentang pertumbuhan

ekonomi dan karakteristik regional di Indonesia. Penelitian tersebut menyatakan bahwa model pertumbuhan Solow (neoklasik) dengan elemen laju pertumbuhan angkatan kerja, laju pertumbuhan penduduk, laju pertumbuhan modal manusia, dan laju pertumbuhan ekspor neto merupakan faktor yang berpengaruh untuk menjelaskan perbedaan pertumbuhan ekonomi yang dapat terjadi karena perbedaan kualitas angkatan kerja antar daerah, pertumbuhan stok modal yang berlainan antar daerah, dan pertumbuhan tenaga kerja yang berlainan antar daerah.

Pada penelitian ini, fungsi produksi Cobb-Douglas tersebut ditambahkan elemen desentralisasi fiskal yang dilambangkan dengan  $A$ . Lambang  $A$  tersebut sering digunakan untuk menggambarkan semua faktor yang dapat mempengaruhi output produksi selain faktor akumulasi modal dan pekerja seperti teknologi, peran suatu lembaga, atau faktor-faktor lainnya yang mampu mempengaruhi output produksi. Dengan demikian, model output produksi yang digunakan adalah  $Y = F(A, K, L)$ .

### **2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Regional Bruto merupakan jumlah nilai tambah produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di dalam suatu wilayah atau daerah pada suatu periode tertentu yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan ekonomi tanpa memerhatikan asal faktor produksi atas barang dan jasa tersebut apakah dimiliki oleh penduduk yang bersangkutan ataupun tidak. Mankiw (2007, 8) menjelaskan bahwa “produk domestik regional bruto mengukur total pendapatan semua orang dalam perekonomian dan total belanja daerah sehingga merupakan indikator yang dapat digunakan untuk menilai kesejahteraan masyarakat”.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), penghitungan nilai PDRB dapat dilakukan dengan 2 jenis harga, yaitu menggunakan pendekatan atas dasar harga berlaku dan pendekatan atas dasar harga konstan. Terhadap ke-2 jenis harga tersebut, BPS menjelaskan bahwa :

“PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) adalah penghitungan PDRB berdasarkan harga tahun berjalan atau harga yang berlaku pada setiap tahun penghitungan dengan masih adanya faktor inflasi di dalamnya. PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) adalah penghitungan PDRB berdasarkan harga tetap atau konstan pada tahun tertentu dengan mengabaikan faktor inflasi. PDRB atas dasar harga konstan bertujuan untuk melihat perkembangan PDRB atau perekonomian secara riil yang kenaikannya/pertumbuhannya tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan harga atau inflasi/deflasi.”

PDRB sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian. Menurut Sukirno (2006) dan sejalan dengan Mankiw (2007), ukuran pertumbuhan ekonomi yang lebih baik adalah dengan menghitung output barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian dan tidak dipengaruhi oleh perubahan harga. Untuk tujuan ini, para ekonom biasanya menggunakan PDB riil, yaitu yang dihitung dengan menggunakan harga konstan. PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi suatu wilayah.

PDRB dapat dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$Y = C + I + G + (X-M)$$

dimana :

- a. Y adalah PDRB, jumlah nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi di dalam suatu wilayah atau daerah pada suatu periode tertentu.
- b. C adalah konsumsi, jumlah nilai pasar dari permintaan rumah tangga atas

barang konsumsi dan jasa.

- c. I adalah investasi, permintaan sektor bisnis untuk investasi.
- d. G adalah pembelian pemerintah, pengeluaran pemerintah untuk memperoleh barang dan jasa.
- e. (X-M) adalah Ekspor Netto, nilai barang dan jasa yang diekspor ke negara lain dikurangi nilai barang atau jasa yang diimpor dari negara lain.

### 2.1.3 Desentralisasi Fiskal

Terdapat beberapa pengertian tentang desentralisasi fiskal. Thiessen (2001, 2) mendefinisikan desentralisasi fiskal sebagai berikut: *“Fiscal decentralisation connotes the (legal) power of sub-national governments to raise tax revenues and decide on spending programmes on their own will within legal criteria.”* Terjemahan bebas atas pengertian di atas adalah desentralisasi fiskal berarti kekuatan (hukum) pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan pajak dan melakukan belanja untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai wewenang pemerintah daerah tersebut.

Mardiasmo (2002) menyebutkan bahwa desentralisasi fiskal akan lebih mampu menyukseskan tujuan-tujuan pembangunan lewat pemberian hak kontrol kepada daerah yang memiliki informasi dan insentif untuk membuat keputusan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pemberian tanggung jawab dan kewenangan yang lebih kepada daerah dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi dari layanan publik. Adapun pengertian desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah: “Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia.”

Menurut *United Nation Development Programme* (1990), terdapat empat pilar keberhasilan desentralisasi fiskal, yaitu penyerahan tanggung jawab belanja (*expenditures responsibilities*), penyerahan pengelolaan sumber pendapatan (*revenue assignment*), alokasi transfer fiskal antara pemerintah pusat ke daerah (*intergovernmental fiscal transfer*), dan pinjaman atau hibah daerah (*subnational borrowing*).

Pilar pertama, tanggung jawab belanja (*expenditures responsibilities*) yaitu melaksanakan fungsi dan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing level pemerintahan, dimana tugas dan tanggung jawab penyediaan barang dan jasa pemerintah harus disediakan pada level pemerintahan terendah dengan efisien.

Pilar kedua, penyerahan pengelolaan pendapatan (*revenue assignment*), yaitu pengelolaan pada sumber pendapatan yang harus diterima oleh pemerintah daerah. Pengelolaan pendapatan seperti pajak daerah, retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah dan pendapatan lainnya yang sah yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat diserahkan wewenangnya kepada daerah. Dimana dalam konteks desentralisasi fiskal adalah untuk memberikan keleluasaan pada pemerintah daerah pada program sosial yang tepat pada konstituennya.

Pilar ketiga, transfer fiskal antara pemerintah pusat dan daerah (*intergovernmental fiscal transfer*), transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah berfungsi untuk memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki cukup pendapatan untuk membiayai pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini dilakukan untuk menunjang pemerataan pembangunan di daerah-daerah,

dimana sebagian dari pendapatan pemerintah pusat penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak diberikan kepada daerah-daerah, yang disebut dengan transfer fiskal atau disebut juga sebagai dana perimbangan.

Pilar keempat adalah pinjaman atau hibah daerah (*subnational borrowing*) yang cukup penting karena seringkali pemerintah daerah tidak mampu menyeimbangkan antara anggaran belanja dengan sumber-sumber pendapatan dan transfer yang diterima dari pemerintah pusat, sehingga menimbulkan saldo defisit (*fiscal deficit*). Untuk itu, agar kebijakan desentralisasi fiskal ini menjadi efisien, pemerintah daerah perlu bertanggungjawab dengan membatasi belanja secara ketat (*hard budget constraint*).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk menciptakan aspek kemandirian di daerah. Dalam buku *Grand Design Desentralisasi Fiskal di Indonesia* (2010) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, menyatakan bahwa sebagai konsekuensi dari sistem desentralisasi fiskal, pemerintah daerah menerima pelimpahan kewenangan di segala bidang, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta keagamaan. Pelimpahan kewenangan tersebut juga diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan berupa penyerahan basis-basis perpajakan maupun bantuan pendanaan melalui mekanisme transfer ke daerah sesuai asas *money follows function*. Brodjonegoro dan Hartanto (2003) berpendapat masih adanya mekanisme transfer ke daerah didasarkan kepada pertimbangan mengurangi ketimpangan fiskal yang mungkin terjadi baik antar daerah (*horisontal imbalances*) maupun antara pemerintah pusat dan daerah (*vertical imbalances*). Untuk meminimalisir ketergantungan pemerintah daerah

kepada pemerintah pusat atas dana transfer tersebut, daerah dituntut dapat berupaya mengoptimalkan kemampuannya dalam menggali potensi pendapatannya. Sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut berupa pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha milik daerah dan pendapatan lain yang sah.

Pada prinsipnya kebijakan desentralisasi fiskal mengharapkan berkurangnya ketergantungan daerah terhadap pusat, sehingga mampu mencapai kemandirian daerah sebagaimana tercapainya tujuan otonomi itu sendiri. Menurut Mardiasmo (2002), ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu daerah dituntut untuk mencari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka pembiayaan pembangunan sehingga PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sementara itu, Brodjonegoro dan Dartanto (2003) menyebutkan bahwa suatu daerah yang memiliki kemampuan fiskal yang cukup memadai akan semakin maju perekonomiannya sedangkan daerah yang tidak memiliki kemampuan fiskal yang memadai akan semakin jauh tertinggal.

Indikator desentralisasi fiskal dalam penelitian ini mengacu pada indikator yang digunakan oleh para peneliti-peneliti terdahulu seperti Sasana (2009), Apriesa dan Miyasto (2013) serta Freddy dkk (2014) yaitu rasio belanja yang bersumber dari PAD terhadap total realisasi belanja daerah. PAD yang diperoleh sesuai dengan potensi daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah yang dianggap sebagai perwujudan desentralisasi. Semakin besar PAD yang dimiliki menunjukkan bahwa daerah tersebut mampu melaksanakan pembiayaan pembangunan secara mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap

pemerintah pusat. Namun demikian kebijakan-kebijakan desentralisasi fiskal yang ada tidak serta merta dapat membangun kemandirian daerah dengan cepat.

#### **2.1.4 Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengertian pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Selanjutnya, pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu prinsip dasar yang penting dari penerapan *good corporate governance* (GCG) di samping transparansi, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (Sanim: 2011). Terciptanya suatu pemerintah daerah yang akuntabel menjadi suatu harapan tersendiri bagi masyarakat, sehingga tercipta suatu sistem pertanggungjawaban pemerintah daerah sebagai entitas yang mengelola dan bertanggung jawab atas penggunaan kekayaan daerah. Menurut Mardiasmo (2006), akuntabilitas dalam konteks sektor publik adalah kewajiban pemegang amanah (pemerintah) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah (masyarakat) yang memiliki hak untuk menerima pertanggungjawaban tersebut.

Salah satu indikator dalam melihat apakah kualitas pengelolaan keuangan suatu pemerintah daerah telah dikelola secara baik atau tidak baik adalah melalui hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil audit BPK terdiri dari opini

dan temuan audit. Penelitian ini menggunakan variabel kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan rasio nilai rupiah temuan hasil audit BPK terhadap total belanja daerah. Temuan audit menunjukkan keberhasilan suatu pemerintah daerah dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga diharapkan mampu mendorong pembangunan daerah dalam rangka merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah. Nilai temuan audit yang tinggi pada suatu pemerintah daerah mengindikasikan bahwa terdapat pelaksanaan belanja pemerintah daerah yang tidak efektif dan efisien atau yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dapat menghambat pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan sehingga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Culloch dan Malesky (2011) meneliti pengaruh tata kelola keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia, yang menyatakan bahwa kualitas tata kelola keuangan daerah dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, namun untuk dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi harus ditunjang oleh unsur PDB lainnya yaitu konsumsi dan pengeluaran pemerintah. Purbadharmaja (2010) yang meneliti implikasi desentralisasi fiskal dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan *good governance* dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali, juga menemukan hubungan positif dan signifikan antara *good governance* dan pertumbuhan ekonomi.

#### **2.1.5 Level Awal Pertumbuhan Ekonomi (*The Initial Level of GDP*)**

Level awal pertumbuhan ekonomi merupakan variabel yang penting dalam mengukur pertumbuhan ekonomi, karena terdapat konvergensi dalam PDRB, di

mana pada suatu negara yang pendapatan perkapitanya masih jauh dari kondisi mapan (*steady state*), cenderung untuk memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Mankiw: 2007).

Teori Konvergensi menyatakan bahwa suatu saat tingkat kemakmuran negara berkembang akan mampu menyusul tingkat kemakmuran negara maju. Hal tersebut dapat terjadi karena negara maju akan mencapai kondisi mapan sehingga tambahan atas tingkat pendapatan negara maju akan melambat atau bahkan tetap. Sementara itu negara berkembang akan terus mengalami penambahan atas tingkat pendapatannya sehingga suatu saat tingkat pendapatan mereka akan konvergen (bertemu di satu titik). Oleh karena itu, ketika suatu negara memiliki pendapatan perkapita awal yang rendah, maka mereka akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Beberapa studi yang menggunakan level awal pertumbuhan ekonomi sebagai variabel yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil yang berbeda. Freddy dkk (2014) berpendapat bahwa variabel level awal pertumbuhan ekonomi (*initial level of GDP*) merupakan variabel yang penting dalam analisis pertumbuhan ekonomi untuk melihat tingkat konvergensi pertumbuhan ekonomi antar wilayah, dimana konvergensi ini mengindikasikan hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan level awal pertumbuhan ekonomi/level awal PDRB, artinya semakin tinggi level awal pertumbuhan ekonomi maka pertumbuhan ekonomi pada tahun berikutnya akan semakin rendah. Sejalan dengan hasil studi Woller dan Phillips (1998), serta Thiessen (2003) yang menyimpulkan bahwa semakin tinggi level awal pertumbuhan ekonomi (*initial level of GDP*) maka akan semakin rendah pertumbuhan ekonomi

pada tahun berikutnya. Berbeda dengan hasil penelitian tadi, Akai dan Sakata (2002) yang menggunakan level awal pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu variabel kontrol yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa level awal pertumbuhan ekonomi merupakan determinan penting dan menyimpulkan bahwa level awal pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi periode berjalan.

#### **2.1.6 Pertumbuhan Penduduk**

*Pertumbuhan penduduk* merupakan perubahan jumlah penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk (migrasi). Pertumbuhan penduduk akan menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja dalam beberapa tahun kemudian, yang secara langsung dianggap sebagai salah satu faktor yang memacu pertumbuhan ekonomi (Todaro: 2000). Namun pertumbuhan penduduk tidak serta merta dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Peningkatan jumlah penduduk yang tidak disertai dengan manajemen sumber daya manusia yang baik dapat menimbulkan pengangguran serta menghambat pertumbuhan ekonomi.

Peningkatan angkatan kerja berarti akan berdampak terhadap peningkatan hasil produksi, dan di sisi lain peningkatan pertumbuhan penduduk juga akan memperluas ukuran pasar sebagai tempat penyaluran hasil produksi tersebut. Namun demikian, pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, pertumbuhan penduduk sering menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat terjadi apabila lapangan kerja yang tersedia tidak mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja yang timbul sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk tersebut. Oleh karena itu untuk mengendalikan jumlah penduduk

pemerintah mencanangkan program keluarga bencana, sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan penduduk dengan ketersediaan lapangan kerja.

Woller dan Phillips (1998) mengemukakan bahwa variabel pertumbuhan penduduk merupakan variabel penting dalam pertumbuhan ekonomi sebagaimana dikemukakan oleh penganut aliran teori pertumbuhan ekonomi klasik seperti Adam Smith, David Ricardo, Malthus dan John Stuart Mill. Menurut penganut teori pertumbuhan ekonomi klasik tersebut, pada awalnya pertumbuhan penduduk akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun pada saat jumlah penduduk terus mengalami pertumbuhan maka akan berlaku hukum *Law of Diminishing Returns*, yaitu penambahan penduduk akan mempengaruhi fungsi produksi dimana produksi marjinal akan mengalami penurunan, dan akan membawa ke kondisi dimana pendapatan per kapita sama dengan produksi marjinal (Sukirno: 2006). Pada kondisi tersebut pendapatan per kapita mencapai kondisi yang maksimum. Jumlah penduduk dimana pendapatan per kapita mencapai kondisi tersebut dinamakan dengan penduduk optimal. Selanjutnya apabila kedepannya jumlah penduduk terus meningkat melebihi titik maksimum tersebut, maka pertumbuhan penduduk justru akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun.

Hubungan antara pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi juga dapat dilihat dari model Pertumbuhan Ekonomi Solow (*Solow Economic Growth*). Dengan mengacu pada Model Pertumbuhan Ekonomi Solow, suatu perekonomian dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi akan mempunyai persediaan modal per pekerja pada kondisi mapan yang rendah dan juga tingkat pendapatan

per pekerja yang rendah (Mankiw: 2007). Dengan kata lain, pertumbuhan penduduk yang tinggi cenderung menyulitkan perekonomian untuk mempertahankan tingkat modal per pekerja yang tinggi apabila jumlah pekerja tumbuh dengan cepat. Namun sebaliknya, akan memperbaiki perekonomian apabila jumlah lapangan kerja yang tersedia tumbuh dan mampu menampung pertumbuhan jumlah pekerja tersebut.

### **2.1.7 Investasi**

Pengertian investasi menurut Fischer dan Dornbusch (1989, 268) adalah “pengeluaran yang ditujukan untuk meningkatkan atau mempertahankan stok barang modal”. Model Pertumbuhan Ekonomi Solow menempatkan investasi sebagai salah satu faktor yang penting dalam pertumbuhan ekonomi. Menurut Mankiw (2007) bahwa pada setiap momen, persediaan modal merupakan determinan output perekonomian yang penting karena persediaan perekonomian yang penting karena persediaan modal bisa berubah sepanjang waktu, dan perubahan tersebut bisa mengarah ke pertumbuhan ekonomi, dan dua kekuatan yang mempengaruhi persediaan modal tersebut adalah investasi dan depresiasi. Dalam hal ini, investasi mengacu pada pengeluaran untuk perluasan usaha dan peralatan baru dimana hal tersebut menyebabkan kenaikan persediaan modal.

Lebih lanjut Todaro (2000) mengemukakan bahwa akumulasi modal diperoleh jika sebagian dari pendapatan yang diterima saat ini ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan meningkatkan *output* dan pendapatan di masa depan. Investasi dapat dilakukan dalam bentuk investasi produktif secara langsung (melalui pengadaan pabrik, mesin-mesin, peralatan-peralatan dan bahan baku baru), investasi dalam bentuk infrastruktur sosial dan ekonomi, dan juga

investasi dalam sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Dalam skala yang lebih luas, investasi merupakan salah satu pos yang digunakan oleh suatu negara dalam menghitung pendapatan nasionalnya disamping konsumsi, belanja pemerintah dan ekspor-impor.

Investasi sering juga disebut sebagai penanaman modal atau pembentukan modal, yang dapat diartikan sebagai pengeluaran/ pembelanjaan modal untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno: 1994). Dalam melakukan pembangunan di daerah, pemerintah daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk belanja penyertaan modal atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Pembentukan modal tetap bruto merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk barang modal sebagai investasi, seperti untuk bangunan, jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan yang diharapkan dapat menggerakkan perekonomian di daerah dan menyerap tenaga kerja.

Investasi pada penelitian ini mengacu pada penelitian Freddy, dkk (2014) dan Hidayat (2016) yang menggunakan nilai pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebagai salah satu variabel kontrol yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kedua penelitian tersebut menyimpulkan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

#### **2.1.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Hasil investasi dalam pembinaan sumber daya manusia (*Human Capital*) dapat dilihat melalui capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM atau *Human Development Indeks* (HDI) pertama kali diperkenalkan oleh UNDP

(*United Nations Development Programme*) yang tertuang dalam *Human Development Report* pada tahun 1990. Pembangunan Manusia didefinisikan oleh UNDP sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. IPM merupakan ukuran standar terhadap pembangunan manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB mengembangkan suatu peringkat kinerja pembangunan manusia yang diberi skala 1,0 – 100,0. Peringkat rendah memiliki nilai IPM kurang dari 50,0, selanjutnya adalah peringkat menengah ke bawah dengan nilai IPM antara 50,0 – 65,9, menengah atas dengan nilai IPM antara 66,00 – 79,9, dan yang terbaik adalah peringkat tinggi dengan nilai IPM lebih dari sama dengan 80,0.

IPM menurut Badan Pusat Statistik, mengukur capaian pembangunan manusia berdasarkan 3 (tiga) dimensi dasar kualitas hidup yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Untuk mengukur dimensi umur panjang dan sehat digunakan angka harapan hidup saat lahir. Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Untuk mengukur dimensi kehidupan yang layak digunakan pengeluaran riil perkapita yang disesuaikan. Menurut Todaro (2010), *human capital* memainkan peran utama dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan.

Beberapa studi tentang pengaruh kualitas sumber daya manusia yang dilihat dari ukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan hasil yang positif. Studi yang dilakukan oleh McGaw (2008) terhadap perekonomian di Korea Selatan, menyatakan bahwa tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi di

Korea Selatan disebabkan oleh sumber daya manusia yang berkualitas, dimana kualitas sumber daya manusia tersebut merupakan hasil dari komitmen nasional terhadap pendidikan dan kesehatan. Senada dengan itu, penelitian di Indonesia yang dilakukan oleh Freddy, dkk (2014) menyimpulkan bahwa *human capital* yang diukur dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun berbeda dengan penelitian tersebut, Supartoyo dkk (2013) menemukan hasil yang mengejutkan dimana *human capital* yang diukur dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut terjadi karena memperhatikan adanya *lag* jumlah modal manusia (*human capital*) yang sedang menempuh studi di perguruan tinggi. *Lag* yang dimaksud dalam penelitian tersebut adalah bahwa dampak atau pengaruh dari *human capital* akan diperoleh setelah beberapa waktu, dimana jangka waktu itu sulit diprediksi secara pasti. Hal ini terjadi karena modal manusia yang berkualitas pada saat penelitian dilakukan sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi sehingga belum produktif.

#### **2.1.9 Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, terdapat dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar lebih baik dibandingkan sebelum otonomi daerah. Aspek pertama adalah bahwa daerah diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) atau sering disebut sebagai aspek desentralisasi fiskal. Aspek kedua yaitu di sisi manajemen pengeluaran daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah harus lebih akuntabel dan transparan, yang

menuntut daerah agar lebih efisien dan efektif dalam melakukan pengeluaran daerah. Kedua aspek tersebut dapat disebut sebagai reformasi pembiayaan atau *Financing Reform*.

Osborne dan Tanzi (1996) menyatakan “*the main economic justification for decentralization rests largely on allocative or efficiency grounds*”. Terjemahan bebas atas kalimat tersebut adalah justifikasi ekonomi untuk desentralisasi sebagian besar karena alokasi dan efisiensi. Desentralisasi akan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya karena pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih baik dibandingkan pemerintah pusat dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal dibandingkan pemerintah pusat. Persaingan antar pemerintah daerah dalam menyediakan barang dan jasa publik akan memacu pemerintah lokal untuk melakukan inovasi untuk menyediakan barang dan jasa publik tersebut, dan pengenaan tarif pajak yang sesuai dengan preferensi masyarakat lokal. Dengan demikian, desentralisasi fiskal telah memacu peningkatan penyediaan produksi barang dan jasa di daerah tersebut, dan juga pendapatan masyarakat di daerah tersebut. Sehingga, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menjadi indikator pertumbuhan ekonomi suatu daerah juga akan meningkat.

Menurut Brodjonegoro dan Dartanto (2003), dalam desentralisasi fiskal, pemerintah daerah merupakan sebuah alat percobaan untuk kepentingan negara sehingga memungkinkan eksperimen dan inovasi dalam proses penyediaan barang publik. Ketika pemerintah daerah mengembangkan dan menerapkan suatu program dalam sistem desentralisasi, program tersebut pertama kali diimplementasikan pada skala yang kecil. Ketika kebijakan tersebut berhasil, maka akan diterapkan pada pemerintah daerah lainnya, bila gagal maka hanya

sebagian kecil pemerintah daerah yang akan mengalami kerugian. Eksperimen yang melibatkan pemerintah tersebut dapat menciptakan kompetisi yang mendukung pemerintah daerah lebih efisien dalam inovasi dan efisiensi alokasi sumber daya.

Masalah desentralisasi fiskal terkait efisiensi alokasi sumber daya dapat diterapkan untuk kerangka pertumbuhan ekonomi (Thiessen: 2001). Desentralisasi fiskal merupakan salah satu bentuk dan komponen utama dalam desentralisasi. Pelaksanaan desentralisasi fiskal mengharapkan berkurangnya ketergantungan daerah terhadap pusat, sehingga mampu mencapai kemandirian daerah sebagaimana tercapainya tujuan otonomi itu sendiri. Menurut Bahl (2000), kebijakan desentralisasi fiskal banyak dipergunakan negara-negara sedang berkembang untuk menghindari ketidakefektifan dan ketidakefisienan pemerintahan, ketidakstabilan ekonomi makro, dan ketidakcukupan pertumbuhan ekonomi.

Disamping itu, pengelolaan keuangan daerah dituntut harus lebih akuntabel dan transparan agar lebih efisien dan efektif dalam melakukan pengeluaran daerah. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sering digunakan sebagai salah satu indikator dalam melihat bahwa pengelolaan keuangan suatu pemerintah daerah telah dikelola secara baik. Hasil audit BPK terdiri dari opini dan temuan audit. Temuan audit yang semakin minim menunjukkan keberhasilan suatu pemerintah daerah dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga diharapkan mampu mendorong pembangunan daerah dalam rangka merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah. Sedangkan nilai temuan audit yang tinggi pada suatu pemerintah daerah

mengindikasikan bahwa terdapat pelaksanaan belanja pemerintah daerah yang tidak efektif dan efisien atau yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini dapat menjadi gangguan pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan sehingga berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Alamsyah (2010) yang meneliti strategi penguatan *good governance* dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di era otonomi daerah, menemukan benang merah antara tata kelola pemerintahan yang baik, desentralisasi dan pertumbuhan ekonomi. Penerapan *good governance* di era desentralisasi akan semakin merangsang partisipasi masyarakat, memicu pertumbuhan ekonomi dan mendorong demokratisasi di tingkat lokal. Menurut Isnaini (2015) diperlukan strategi untuk mengatasi permasalahan tata kelola keuangan dan pembangunan daerah dengan perencanaan kebijakan fiskal yang mensinergikan antara peran pemerintah pusat dan daerah.

#### **2.1.10 Tinjauan Penelitian Terdahulu**

- 1) Penelitian oleh Brodjonegoro dan Dartanto (2003) yang dilakukan terhadap 30 Provinsi di Indonesia untuk melihat bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan disparitas antar daerah di Indonesia pasca otonomi daerah. Penelitian dilakukan dengan menggunakan *cross section* dan analisis makro ekonometrik simultan, dengan kesimpulan sebagai berikut: Desentralisasi Fiskal di Indonesia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia tetapi nilai pertumbuhan yang dihasilkan relatif kecil. Pertumbuhan ekonomi lebih tinggi terjadi di luar Jawa dan Bali, sehingga pada akhirnya

daerah-daerah di luar Jawa dan Bali akan mampu mengejar ketertinggalannya terhadap wilayah Jawa dan Bali. Desentralisasi fiskal belum mampu mengurangi disparitas antar daerah.

- 2) Penelitian oleh Sasana (2009), yang mengambil populasi 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2001-2005, menguji peran Desentralisasi Fiskal terhadap Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. Model penelitian yang digunakan adalah analisis jalur (*path analysis*). Penelitian tersebut menggunakan data panel, dengan kesimpulan sebagai berikut: Desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di kabupaten/kota pada Provinsi Jawa Tengah. Pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan tenaga kerja terserap, pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan yang negatif dan signifikan dengan dengan jumlah penduduk miskin, pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Penelitian oleh Purbadharmaja (2010), yang meneliti implikasi desentralisasi fiskal dan *good governance* terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, yang mengambil sampel 8 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bali. Penelitian dilakukan dengan data panel menggunakan *Partial Least Square* (PLS), dengan kesimpulan sebagai berikut: Desentralisasi Fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, struktur Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap *good governance*.

- 4) Penelitian oleh Alamsyah (2010), yang meneliti strategi penguatan *good governance* dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di era otonomi daerah, menyimpulkan bahwa penerapan *good governance* di era desentralisasi akan semakin merangsang partisipasi masyarakat, memicu pertumbuhan ekonomi, dan mendorong demokratisasi di tingkat lokal.
- 5) Penelitian oleh Apriesta dan Miyasto (2013), yang mengambil populasi 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah periode 2008-2011, menggunakan variabel kontrol peningkatan angkatan kerja, pertumbuhan penduduk dan tingkat pajak daerah. Model penelitian yang digunakan adalah model *Ordinary Least Square* (OLS). Penelitian menggunakan data panel dan analisis regresi linear, dengan kesimpulan sebagai berikut: Desentralisasi Fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah, pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
- 6) Penelitian oleh Freddy, dkk (2014), yang mengambil populasi 30 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2012. Variabel kontrol yang digunakan adalah investasi, akumulasi modal manusia dan level awal pertumbuhan ekonomi. Penelitian tersebut dilakukan dengan menggunakan data panel dan model analisis regresi berganda, dengan kesimpulan sebagai berikut: Desentralisasi fiskal dengan indikator pengeluaran dan indikator pendapatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara, level awal pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara, pertumbuhan

penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara, investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara, *human capital* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara.

- 7) Penelitian oleh Isnaini (2015), yang mengambil sampel 436 pemerintah daerah di Indonesia periode 2005-2012. Penelitian dilakukan dengan model ekonometrika menggunakan data panel dan model analisis regresi linear, dengan kesimpulan sebagai berikut: Derajat desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, tata kelola keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, kapasitas ekonomi daerah tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, daerah yang mendapat opini WTP mempunyai pertumbuhan ekonomi lebih tinggi daripada yang mendapat opini selain WTP.
- 8) Penelitian oleh Hidayat (2016), yang mengambil populasi 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur periode 2009-2013. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah Tingkat Pertumbuhan Angkatan Kerja (TPAK) dan Investasi. Penelitian dilakukan dengan metode OLS, menggunakan data panel dan model analisis regresi linear, dengan kesimpulan sebagai berikut: Desentralisasi fiskal indikator penerimaan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, pertumbuhan angkatan kerja berpengaruh

negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

## **2.2 Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis**

### **2.2.1 Kerangka Pemikiran**

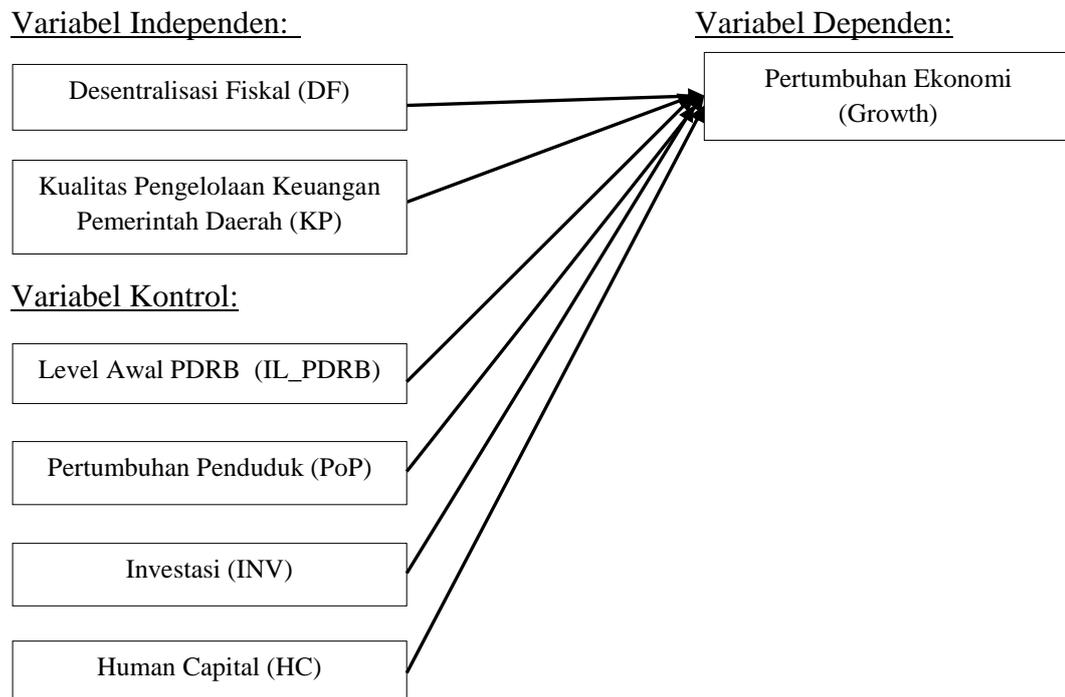
Pemerintah pusat mengharapkan setiap daerah berupaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing, sebab pertumbuhan ekonomi di daerah akan secara langsung meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pada era otonomi daerah, desentralisasi fiskal dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah merupakan alat yang digunakan pemerintah untuk mendorong perekonomian daerah maupun nasional secara berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, pemerintah Indonesia telah menerapkan otonomi daerah yang mengubah skema pembangunan dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi agar daerah dapat secara efektif dan efisien menggali serta mengelola sumber daya yang dimiliki dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi di daerah.

Untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal dan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, tentunya perlu memperhatikan kajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pengabaian terhadap faktor-faktor tersebut yang kemungkinan memiliki pengaruh penting dalam pertumbuhan ekonomi akan memberikan simpulan yang bias tentang pengaruh desentralisasi fiskal dan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu faktor-faktor lain tersebut akan dijadikan sebagai variabel-variabel kontrol oleh penulis untuk menghindari simpulan yang bias.

Sesuai dengan model pertumbuhan ekonomi Solow dalam Mankiw (2007, 184), komponen utama yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah

modal, pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan Produk Domestik Bruto Regional (PDRB), dimana permintaan terhadap output atau pos pendapatan nasional bergantung pada konsumsi, investasi dan belanja pemerintah. Berdasarkan hasil studi empiris sebelumnya tentang dampak desentralisasi fiskal dan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, beberapa variabel yang merupakan determinan dari pertumbuhan ekonomi diantaranya adalah investasi, akumulasi modal manusia dan level awal pertumbuhan PDRB, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Freddy, dkk (2014), Thiessen (2001) serta Woller dan Phillips (1998).

Gambar 2.1  
Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah oleh penulis

Investasi akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan merangsang peningkatan kapasitas produksi melalui penambahan persediaan atau modal.

Untuk akumulasi modal manusia dibagi menjadi 2 sisi yaitu kuantitas modal manusia dan kualitas modal manusia. Dari sisi kuantitas modal manusia, penambahan jumlah penduduk menyebabkan jumlah tenaga kerja yang tersedia lebih besar sehingga akan meningkatkan jumlah produksi dan juga meningkatkan ukuran pasar domestik. Sedangkan dari sisi kualitas modal manusia, peningkatan kualitas modal manusia akan meningkatkan kemampuan pekerja dalam menambah produksi. Level awal pertumbuhan PDRB digunakan untuk melihat posisi awal perekonomian, dimana ketika suatu daerah memiliki pendapatan perkapita awal yang rendah (jauh dari kondisi mapan), maka cenderung akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

### **2.2.2 Pengembangan Hipotesis**

Terdapat dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar lebih baik dibandingkan sebelum otonomi daerah (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004). Aspek pertama adalah bahwa daerah diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan pendapatan asli daerah (PAD) atau sering disebut sebagai aspek desentralisasi fiskal, dan aspek kedua yaitu di sisi manajemen pengeluaran daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah harus lebih akuntabel dan transparan, yang menuntut daerah agar lebih efisien dan efektif dalam melakukan pengeluaran daerah.

#### **2.2.2.1 Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan teori dan berbagai penelitian terdahulu yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah daerah melalui pelaksanaan desentralisasi fiskal dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pada prinsipnya kebijakan desentralisasi fiskal mengharapkan berkurangnya ketergantungan daerah terhadap pusat, sehingga mampu mencapai kemandirian daerah sebagaimana tercapainya tujuan otonomi itu sendiri.

Brodjonegoro dan Dartanto (2003) berpendapat bahwa suatu daerah yang memiliki kemampuan fiskal yang cukup memadai akan semakin maju perekonomiannya sedangkan daerah yang tidak memiliki kemampuan fiskal yang memadai akan semakin jauh tertinggal. Sehingga dari rumusan masalah, tinjauan teori dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai anggapan sementara seperti berikut:

H<sub>1</sub> : Desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung

#### **2.2.2.2 Pengaruh Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Konsekuensi dari otonomi daerah yang berkenaan dengan pelimpahan wewenang dari pusat kepada daerah, maka pemerintah daerah dituntut untuk menyajikan informasi keuangan yang sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan agar bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Kualitas pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkesinambungan. Indikator yang sering digunakan untuk melihat kualitas pengelolaan keuangan daerah adalah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang terdiri dari opini dan temuan audit. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang baik serta dilaksanakan secara efektif dan efisien dapat mendorong terlaksananya pembangunan sehingga diharapkan mampu memicu pertumbuhan ekonomi daerah (Alamsyah: 2010). Sehingga dari rumusan masalah, tinjauan teori dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai anggapan sementara seperti berikut.

H<sub>2</sub> : Kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder, dimana data yang digunakan merupakan data yang diterbitkan oleh orang yang bukan pengolahnya atau data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, yang umumnya berupa bukti, catatan/ laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan ataupun yang tidak dipublikasikan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data keuangan dan non keuangan kabupaten dan kota se Provinsi Lampung periode 2010-2014, yang meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), realisasi pendapatan dan belanja daerah, temuan hasil audit BPK, jumlah penduduk, investasi pemerintah daerah dalam bentuk belanja pembentukan modal tetap bruto (PMTB), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Data dalam penelitian ini berbentuk data panel karena melibatkan banyak objek (*cross section*) dan terdiri atas beberapa periode waktu (*time series*). Data-data yang dibutuhkan penulis diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Biro Keuangan Provinsi Lampung, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan.

### **3.2 Populasi dan Sampel**

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Lampung. Sementara sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 14 kabupaten/ kota yang ada di Provinsi Lampung. Penulis mengambil sampel dengan metode *purposive sampling-judging* atau dengan pertimbangan tertentu oleh penulis.

### **3.3 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional Variabel**

Penelitian ini menggunakan variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol. Variabel-variabel tersebut ditetapkan oleh peneliti karena dianggap mempengaruhi penelitian yang dilakukan, untuk selanjutnya data-data yang dikumpulkan akan dipelajari sehingga diperoleh informasi, kemudian diambil kesimpulannya.

#### **3.3.1 Variabel Dependen**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi (*growth*). Untuk mengukur variabel pertumbuhan ekonomi digunakan nilai pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung periode 2010-2014. Seperti diketahui, ada dua jenis cara penilaian PDRB yaitu PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) dan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB). Alasan peneliti lebih memilih PDRB atas dasar harga konstan daripada harga berlaku adalah karena PDRB atas dasar harga konstan lebih menggambarkan perekonomian secara riil karena tidak dipengaruhi oleh perubahan harga atau inflasi, sedangkan PDRB berdasarkan harga berlaku dapat menyesatkan karena adanya pengaruh inflasi. Untuk menghitung nilai

pertumbuhan PDRB diperoleh dengan cara menghitung selisih PDRB atas dasar harga konstan periode yang diuji dengan periode tahun sebelumnya dan kemudian dibagi dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun sebelumnya, yang dinotasikan sebagai berikut:

$$Growth = \frac{(PDRB \text{ tahun berjalan} - PDRB \text{ tahun sebelumnya})}{PDRB \text{ tahun sebelumnya}}$$

### 3.3.2 Variabel Independen

#### a. Desentralisasi Fiskal

Untuk mengukur Desentralisasi Fiskal (DF) digunakan indikator pengeluaran (belanja), yaitu rasio belanja pemerintah kabupaten/kota yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total belanja daerah, yang di dalamnya termasuk dana yang diterima dari pemerintah pusat dan provinsi yang berupa perimbangan dan dana transfer lainnya. Pengukuran tersebut menggambarkan kemandirian atau kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. Pengukuran desentralisasi fiskal dinotasikan sebagai berikut:

$$DF = \frac{\text{Total PAD}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

#### b. Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (KP) menggunakan proksi temuan audit yang diukur dengan rasio nilai rupiah temuan hasil audit terhadap total realisasi belanja. Variabel ini merupakan variabel *dummy*, atas dasar pertimbangan tertentu oleh penulis dimana jika rasio yang bernilai material (rasio > 0,0025) artinya bahwa kualitas pengelolaan keuangan

kategori tidak baik diberi nilai 0, sedangkan rasio yang tidak material (rasio < 0,0025) yang artinya bahwa kualitas pengelolaan keuangan kategori baik diberi nilai 1.

### 3.3.3 Variabel Kontrol

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah Level awal pertumbuhan PDRB (IL\_PDRB), pertumbuhan penduduk (POP), Investasi (INVS) dan *Human Capital* (HC). Untuk mengetahui lebih dalam mengenai variabel-variabel tersebut maka diperlukan suatu definisi operasional variabel.

#### a. Level Awal Pertumbuhan PDRB (IL\_PDRB)

Level Awal Pertumbuhan PDRB (IL\_PDRB) merupakan nilai PDRB awal dari tahun yang diteliti atau nilai atas PDRB tahun sebelumnya, yang disajikan dalam satuan juta perkapita, dinotasikan sebagai berikut:

$$IL\_PDRB = \frac{PDRB \text{ awal tahun (juta rupiah)}}{Jumlah \text{ Penduduk awal tahun}}$$

#### b. Pertumbuhan Penduduk (PoP)

Pertumbuhan penduduk merupakan peningkatan jumlah penduduk dalam suatu daerah tertentu. Pertumbuhan penduduk diukur berdasarkan perbandingan perubahan penduduk tahun berjalan terhadap jumlah penduduk tahun sebelumnya.

#### c. Investasi (INVS)

Investasi merupakan perbandingan investasi pemerintah daerah dalam bentuk belanja modal PMTB terhadap PDRB atas dasar harga konstan, dinotasikan sebagai berikut:

$$INV = \frac{PMTB \text{ tahun berjalan}}{PDRB \text{ tahun berjalan}}$$

d. *Human Capital* (HC)

*Human capital* merupakan modal manusia dalam bentuk pembinaan sumber daya manusia. *Human capital* diukur dengan menggunakan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

### 3.4 Model Penelitian

Sebagaimana studi yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dalam melihat pengaruh desentralisasi fiskal dan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, penelitian ini juga memasukkan beberapa variabel kontrol yaitu level awal pertumbuhan PDRB, pertumbuhan penduduk, investasi dan *human capital*. Variabel-variabel kontrol ini dimasukkan ke dalam penelitian untuk mengeliminasi atau mengurangi dampak yang bisa diakibatkan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti.

Untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen beserta variabel-variabel kontrol terhadap variabel dependen dalam penelitian ini digunakan model analisis regresi linear berganda. Model analisis regresi linier berganda yang digunakan mengacu pada model yang digunakan oleh peneliti sebelumnya yaitu Freddy, dkk (2014). Model penelitian ini dapat dinotasikan sebagai berikut :

$$\text{GROWTH} = \beta_0 + \beta_1\text{DF}_{it} + \beta_2\text{KP}_{it} + \beta_3\text{IL\_PDRB}_{it} + \beta_4\text{PoP}_{it} + \beta_5\text{INV}_{it} + \beta_6\text{HC}_{it} + e_{it}$$

di mana:

|        |   |
|--------|---|
| Growth | : Pertumbuhan ekonomi   |
| DF     | : Desentralisasi Fiskal   |
| KP     | : Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah                     |
| PoP    | : Pertumbuhan Penduduk  |
| INV    | : Investasi   |
| HC     | : <i>Human Capital</i> , yaitu nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) |

|   |  |
|---|--|
| IL_PDRB                                       | : Level Awal Pertumbuhan PDRB ( <i>Initial Level of PDRB</i> ) |
| $\beta_0$                                     | : Konstanta  |
| $\beta_1$                                     | : koefisien variabel independen                                |
| $\beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6$ | : koefisien variabel kontrol                                   |
| $i$   | : <i>cross Section</i> (pemerintah daerah di Provinsi Lampung) |
| $t$   | : <i>time Series</i> (2010-2014)                               |
| $e$   | : <i>Error</i>   |

Untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal dan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, tentunya perlu memperhatikan kajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pengabaian terhadap faktor-faktor tersebut yang kemungkinan memiliki pengaruh penting dalam pertumbuhan ekonomi akan memberikan simpulan yang bias tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Alasan peneliti dalam memilih variabel-variabel kontrol tersebut karena peneliti beranggapan bahwa variabel-variabel tersebut mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga dapat berguna untuk menghindari adanya bias yang mungkin timbul oleh faktor luar. Dan juga agar pengaruh desentralisasi fiskal dan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dilihat secara bersama-sama dengan variabel lain dalam peranannya terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

Investasi akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dengan merangsang peningkatan kapasitas produksi melalui penambahan persediaan atau modal. Untuk akumulasi modal manusia dibagi menjadi 2 sisi yaitu kuantitas modal manusia dan kualitas modal manusia. Dari sisi kuantitas modal manusia, pertambahan jumlah penduduk menyebabkan jumlah tenaga kerja yang tersedia lebih besar yang berarti akan meningkatkan jumlah produksi dan juga

pertambahan jumlah penduduk juga meningkatkan ukuran pasar domestik. Sedangkan dari sisi kualitas modal manusia, peningkatan kualitas modal manusia akan meningkatkan kemampuan pekerja dalam menambah produksi. Level awal pertumbuhan PDRB digunakan untuk melihat posisi awal perekonomian, dimana ketika suatu daerah memiliki pendapatan perkapita awal yang rendah (jauh dari kondisi mapan), maka mereka cenderung akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Pertumbuhan ekonomi yang dimaksud dalam persamaan model penelitian adalah pertumbuhan PDRB riil kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Data pertumbuhan PDRB diperoleh dari nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 yang bersumber dari publikasi BPS. Untuk variabel independen, desentralisasi fiskal (DF) pada penelitian ini menggunakan rasio belanja pemerintah kabupaten/kota yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total belanja daerah termasuk dana yang diterima dari pemerintah pusat dan provinsi yang berupa dana transfer. Sementara variabel independen kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah (KP) menggunakan proksi temuan audit yang diukur dengan rasio nilai rupiah temuan hasil audit terhadap total realisasi belanja. Variabel ini merupakan variabel *dummy* dimana jika rasio yang bernilai material (rasio  $> 0,0025$ ) akan diberi nilai 0 yang artinya bahwa kualitas pengelolaan keuangan kategori tidak baik, sedangkan rasio yang tidak material (rasio  $< 0,0025$ ) diberi nilai 1 yang artinya bahwa kualitas pengelolaan keuangan kategori baik.

Untuk variabel kontrol, level awal pertumbuhan ekonomi (IL\_PDRB) merupakan tingkat PDRB riil perkapita yang dimiliki suatu daerah pada tahun

awal atau akhir periode sebelumnya, satuan yang digunakan adalah dalam jutaan rupiah perkapita. Pertumbuhan penduduk (PoP) yang dimaksud dalam persamaan penelitian adalah perubahan jumlah penduduk tahun berjalan dibanding tahun sebelumnya. Variabel investasi (INV) dalam penelitian ini merupakan rasio investasi pemerintah daerah dalam bentuk belanja modal PMTB terhadap PDRB atas dasar harga konstan. Variabel *human capital* (HC) dalam penelitian ini adalah ukuran modal manusia yang menggunakan indeks pembangunan manusia (IPM) regional.

### 3.5 Pemilihan Model Regresi

Penelitian ini menggunakan regresi data panel dalam menganalisa pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Penelitian ini melibatkan kabupaten/kota sebagai *cross section* dan antar tahun menjadi *time series*. Menurut Nachrowi dan Usman (2006), dalam melakukan estimasi model regresi data panel digunakan tiga teknik uji regresi, yaitu *common effect*, *fixed effect* dan *random effect*.

Dengan *common effect/ OLS (ordinary least square)*, akan dihasilkan data nilai residual yang sekecil mungkin dengan cara menjumlahkan kuadrat residual. Semakin kecil nilai residualnya maka nilai analisis regresi yang dihasilkan akan semakin mendekati nilai aktualnya. Residual merupakan suatu peubah acak yang bersifat identik dan independen serta terdistribusi secara normal dan varians tertentu di antara sampel.

Sementara untuk *fixed effect* (model efek tetap), dasar pemikiran dari teknik ini adalah adanya variabel-variabel yang tidak semuanya masuk dalam persamaan model memungkinkan adanya *intercept* yang tidak konstan, atau

dengan kata lain, intersep ini mungkin berubah untuk setiap individu dan waktu. Menurut Winarno (2011) pendekatan model efek tetap ini mengasumsikan bahwa *slope* koefisien konstan sedangkan intersepnnya bisa bervariasi antar individu dan waktu. Salah satu cara untuk membedakan intersep antar individu sering dilakukan pendekatan dengan cara memasukan variabel semu (*dummy*). Sehingga model ini sering disebut *Least Square Dummy Variabels* (LSDV).

Sedangkan dalam model *random effect* (efek acak), penggunaan variabel boneka dapat mengurangi derajat kebebasan yang mempengaruhi efisiensi dari parameter yang diestimasi. Dalam model efek acak, perbedaan antar parameter dimasukkan ke dalam *error*, baik antar individu maupun antar waktu. Karena itulah model efek acak ini seringkali disebut model komponen eror.

Widarjono (2007) menyarankan bahwa untuk memilih teknik analisis yang paling baik diantara *common effect* (OLS), *Fixed Effect* (LSDV) dan *random effect* dalam menguji model penelitian yang telah ditentukan, perlu dilakukan beberapa pengujian antara lain Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier, sebagai berikut:

### 3.5.1 Uji Chow

Pengujian yang pertama adalah untuk memilih teknik analisis yang akan digunakan paling baik di antara model *fixed effect* dan *Ordinary Least Square*. Untuk melakukan pengujian tersebut, peneliti akan menggunakan uji signifikansi *fixed effect* yang disebut sebagai Uji Chow. Uji ini dilakukan dengan membandingkan antara  $F_{stat}$  dengan  $F_{tabel}$ . Nilai  $F_{stat}$  atau sering juga disebut sebagai  $F_{hitung}$  dapat diperoleh dari olahan data eviews 8.1, sedangkan nilai  $F_{tabel}$

dicari dengan cara menggunakan tabel ataupun dengan menggunakan alat bantu *microsoft excel*. Hipotesis yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

$H_0$  : model *common effect*

$H_a$  : model *fixed effect*

Apabila  $F_{stat} > F_{tabel}$  maka kita menolak  $H_0$  dan menyimpulkan bahwa model *fixed effect* lebih baik dari pada model *common effect*. Sebaliknya apabila  $F_{stat} < F_{tabel}$  maka kita menerima  $H_0$  dan menyimpulkan bahwa model *common effect* lebih baik dari pada model *fixed effect*.

### 3.5.2 Uji Hausman

Pengujian berikutnya yang dilakukan adalah untuk memilih teknik analisis yang paling baik di antara model *random effect* dan model *fixed effect* untuk digunakan dalam pengujian regresi. Untuk melakukan pengujian tersebut, peneliti akan melakukan uji *Hausman*. Pelaksanaan uji *Hausman* dapat dilakukan dengan fasilitas *software Eviews 8.1*. Dari hasil uji *Hausman* ini nanti akan dilihat nilai *chi-square* statistik/hitung dan probabilitasnya. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

$H_0$  : Model *Random Effect*

$H_a$  : Model *Fixed Effect*

Pada aplikasi yang digunakan dalam penelitian ini (*eviews 8.1*), apabila nilai *chi-square* statistik/hitung  $>$  *chi-square* tabel dan *p-value* signifikan ( $P\text{-value} < \alpha$ ) maka kita menolak  $H_0$  dan menyimpulkan bahwa model yang lebih baik adalah *fixed effect*, sebaliknya apabila nilai *chi-square* statistik/hitung  $<$  *chi-square* tabel dan  $P\text{-value} > \alpha$  maka kita menerima  $H_0$  dan menyimpulkan bahwa model yang lebih baik adalah *random effect*.

### 3.5.3 Uji Lagrange *Multiplier* (LM)

Apabila dari kedua pengujian sebelumnya didapatkan hasil pada salah satu pengujian atau bahkan kedua pengujian ada yang menerima  $H_0$ , selanjutnya dilakukan pengujian yang dinamakan Uji *Lagrange Multiplier* (LM) yang disebut juga *Breusch - Pagan Random Effect*. Namun, jika hal tersebut tidak terjadi, maka pengujian ini tidak perlu untuk dilakukan. Pengujian ini dilakukan untuk memilih teknik analisis yang akan digunakan paling baik di antara model *common effect* dan model *random effect*. Hipotesa yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

$H_0$  : Model *Common Effect*

$H_a$  : Model *Random Effect*

Hasil uji *Lagrange Multiplier* akan dilihat nilai statistik *chi-squares* hasil olahan data eviews. Apabila nilai dari uji *Lagrange Multiplier* nilainya lebih besar daripada nilai kritis statistik *chi-squares*, maka kita menolak  $H_0$ . Dengan kata lain akan digunakan model *random effect* karena dianggap lebih baik. Apabila nilai dari hasil Uji *Lagrange Multiplier* berada dibawah nilai kritis statistik *chi-square* maka akan menerima  $H_0$ . Jika  $H_0$  diterima maka dapat diambil kesimpulan lebih baik menggunakan model *random effect*.

### 3.6 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan agar model regresi linear yang digunakan memenuhi kriteria BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Menurut Gujarati (2012), empat uji asumsi klasik yang perlu dilakukan adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

### 3.6.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menilai bahwa variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Gujarati: 2012). Uji normalitas pada aplikasi *EViews* 8.1 dapat dilakukan dengan melihat pola pada histogram yaitu nilai probabilitas pada histogram tersebut, ataupun melakukan uji Jarque-Bera.

Hasil dari uji normalitas ini dapat disimpulkan dengan melihat tampilan histogramnya, data yang terdistribusi normal akan menampilkan pola kurva normal yang berbentuk seperti lonceng terlengkup. Namun demikian akan sulit melihat hanya dari gambar histogram saja, oleh karena itu untuk memperkuat kesimpulan, dapat dilihat dari nilai uji Jarque-Bera. Nilai uji Jarque Bera (JB) yang diperoleh dari *histogram normality test* pada *Eviews* 8.1 dibandingkan dengan nilai *chi-square* tabel. Jika hasil JB hitung lebih besar dari nilai *chi-square* tabel artinya data tidak terdistribusi normal, dan sebaliknya jika JB hitung lebih kecil dari nilai *chi-square* tabel artinya data terdistribusi normal.

### 3.6.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas dilakukan untuk menilai apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Gujarati: 2012). Apabila terjadi korelasi antar variabel bebas, maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal atau terjadi kemiripan. Untuk menilai korelasi antar variabel tersebut pada *EViews* 8 digunakan *correlation matrix* (Winarno, 2011). *Correlation matrix* tersebut akan menampilkan nilai korelasi di antara variabel-variabel bebas. Jika korelasi antar variabel-variabel bebas tersebut di atas 0,80 maka dapat disimpulkan terdapat gejala multikolinieritas.

### 3.6.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji terjadinya ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Gujarati: 2012). Penulis menggunakan uji *glejser* yakni dengan meregresikan nilai mutlak. Dengan ketentuan, jika nilai probabilitasnya tidak signifikan atau di atas nilai  $\alpha$  (0,05) maka  $H_0$  diterima artinya tidak ada heteroskedastisitas. Namun, jika nilai probabilitasnya signifikan atau di bawah nilai  $\alpha$  (0,05) maka  $H_0$  ditolak, yang berarti ada masalah heteroskedastisitas. Pada aplikasi *EViews 8* untuk melihat hasil uji *glejser* tersebut penulis menggunakan pengujian nilai dari *residual absolute*. Heteroskedastisitas sering terjadi pada data yang bersifat *cross section* dibandingkan data yang bersifat *time series*. Sebagai contoh, pada penelitian tentang keuangan perusahaan akan terdapat perbedaan yang cukup besar antara perusahaan kecil dan perusahaan besar (Winarno, 2011, 5.8).

### 3.6.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah terdapat korelasi antara residual pada periode  $t$  dengan residual pada periode sebelumnya ( $t-1$ ) pada model regresi linier (Gujarati: 2012). Beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi gejala autokorelasi yaitu uji Durbin Watson (DW test) dan Uji Breusch-Godfrey (Winarno, 2011). Metode yang akan digunakan pada penelitian ini adalah uji Durbin Watson (DW test). Hasil uji Durbin Watson akan menghasilkan nilai  $d$  yang akan berada di kisaran 0 hingga 4. Di mana apabila  $d$  terletak di antara 0 dan  $d_L$ , maka disimpulkan bahwa terjadi autokorelasi positif. Bila  $d$  terletak di antara  $d_L$  dan  $d_U$  maka tidak dapat diputuskan. Bila  $d$  terletak di antara  $d_U$  dan  $4-d_U$  maka

tidak terjadi autokorelasi. Bila  $d$  terletak di antara  $4-d_U$  dan  $4-d_L$  maka tidak dapat diputuskan. Bila  $d$  terletak di antara  $4-d_L$  dan  $4$  maka terjadi autokorelasi negatif.

### **3.7 Pengujian Hipotesis**

Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara menilai apakah hipotesis berpengaruh signifikan secara statistik atau tidak terhadap variabel-variabel yang diuji. Jika setelah dilakukan pengujian diperoleh hasil hipotesis diterima, maka pengujian signifikan secara statistik. Jika hipotesis ditolak, maka pengujian tidak signifikan secara statistik. Ada 3 jenis pengujian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### **3.7.1 Pengujian Koefisien Determinasi *R-square* ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Gujarati: 2012). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai *R-square* yang kecil menandakan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Sedangkan nilai yang hampir mendekati satu menandakan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

#### **3.7.2 Pengujian Model secara Keseluruhan (uji F)**

Uji F menunjukkan apakah semua variabel-variabel independen dan kontrol yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai F hitung yang diperoleh dari olahan data eviews 8.1 dengan nilai F menurut tabel dengan signifikansi  $\alpha$  0,05. Hipotesis yang dibangun adalah

$H_0$  variabel-variabel independen dan kontrol secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel terikat, dan  $H_a$  variabel-variabel independen serta kontrol secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat. Bila nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka  $H_0$  ditolak dan menerima  $H_a$ . Dan sebaliknya jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima.

### **3.7.3 Pengujian Koefisien Regresi secara Parsial (uji t)**

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen desentralisasi fiskal secara terpisah (parsial) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen *growth*. Apakah suatu variabel-variabel independen dan kontrol bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen atau sebaliknya merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Dengan membandingkan nilai statistik  $t$  dengan titik kritis menurut tabel (nilai  $t$  tabel). Apabila nilai statistik  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka hipotesis yang menyatakan suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen, dapat diterima. Penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi  $\alpha$  sebesar 0,05, namun untuk variabel kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah (KP) pada uji  $t$  ini akan diuji dengan menggunakan tingkat signifikansi  $\alpha$  sebesar 0,1.

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi linier berganda dengan metode *ordinary least square* (OLS) menunjukkan bahwa variabel independen desentralisasi fiskal (DF) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Dengan demikian, berarti setiap kenaikan desentralisasi fiskal akan menyebabkan kenaikan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa dengan tingkat signifikansi  $\alpha$  sebesar 0,1 variabel independen kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah (KP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Hal ini berarti bahwa semakin baik kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.
3. Variabel kontrol antara lain variabel level awal pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, variabel investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi,

sedangkan variabel pertumbuhan penduduk dan *human capital* tidak berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan ekonomi.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Terdapat keterbatasan yang dihadapi penulis dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Terdapat satu kabupaten, yaitu Kabupaten Pesisir Barat yang tidak memiliki data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini karena baru memisahkan diri dari kabupaten induknya pada oktober 2012. Oleh karena itu penulis hanya mengambil sampel 14 kabupaten/kota dari 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung, sehingga hasil penelitian ini belum menggambarkan kondisi perekonomian di Provinsi Lampung secara utuh.
2. Pada penelitian ini variabel kemajuan teknologi tidak digunakan karena keterbatasan data yang dapat mewakili tingkat kemajuan teknologi daerah di kabupaten/kota pada Provinsi Lampung.
3. Variabel kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah hanya berfokus pada hasil pemeriksaan BPK menggunakan proksi nilai rupiah temuan hasil audit.

## 5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang dihadapi penulis dalam melakukan penelitian ini, penulis memberi beberapa saran antara lain:

1. Pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Lampung perlu meningkatkan kemampuan desentralisasi fiskal dengan cara meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan mengoptimalkan potensi-potensi yang dimiliki serta memperbaiki kualitas tatakelola keuangan pemerintah daerah, karena hal ini

mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung.

2. Untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi, agar memperluas observasi penelitian serta periode tahun yang lebih lama.
3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar menambahkan variabel teknologi sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Disamping itu, disarankan juga agar variabel kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah menggunakan proksi selain nilai rupiah temuan hasil audit BPK seperti kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian APBD, serta kelemahan srtuktur pengendalian intern.

## DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu, Daron. 2007. *Introduction to Modern Economic Growth*. Department of Economics Working Paper. Massachusetts Institute of Technology.
- Akai, Nobuo and Sakata, Masayo. 2002. *Fiscal decentralization contributes to economic growth: evidence from state-level cross-section data for the United States*. *Journal of Urban Economics* 52, 93-108.
- Alamsyah. Desember 2010. Strategi Penguatan *Good Governance* dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Dinamika*. Vol 3, No 6, 1-9.
- Apriesa, Lintangia F., dan Miyasto. 2013. Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Pendapatan (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of Economics*. Vol 2, No 1, 1-12.
- Badan Pusat Statistik Lampung. 2015. *Statistik Daerah Lampung Tahun 2014*. Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Lampung. 2015. *Indikator Ekonomi Provinsi Lampung Tahun 2014*. Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Lampung. 2015. *Tinjauan Ekonomi Regional Daerah Otonom Provinsi Lampung tahun 2014*. Indonesia.
- Badan Pusat Statistik Lampung. 2015. *Lampung Dalam Angka 2014*. Indonesia.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2011. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2010*. Indonesia.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2011*. Indonesia.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2013. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2012*. Indonesia.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2014. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2013*. Indonesia.

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2015. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2014*. Indonesia.
- Bahl, Roy W., 2000. *China: Evaluating the Impact of Intergovernmental Fiscal Reform* dalam *Fiscal Decentralization in Developing Countries*. Edited by Richard M. Bird and Francois Vaillancourt, United Kingdom: Cambridge University Press.
- Brodjonegoro, P.S., dan Dartanto, Teguh. 2003. Dampak Desentralisasi Fiskal di Indonesia terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas antar Daerah: Analisa Model Makro Ekonometrik Simultan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*. Vol 4. No 1, 17-38.
- Culloch M, Malesky E. 2011. *Does Better Local Governance Improve District Growth Performance in Indonesia?* Brighton: Economics Departement Institute of Development Studies Working Paper Series 17-2011.
- Fischer, Stanley and Dornbusch, Rudiger. Penerjemah: J. Mulyadi. 1989. *Makro Ekonomi Edisi Keempat*. Jakarta: Erlangga.
- Freddy., Sirojuzilam., Erlina dan Suriadi, Agus. 2014. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara pada periode 2009-2012*. *Jurnal Ekonom*. Vol 17, No 3, 125-137.
- Fuad, Noor., Megantara, Andie., Prabarathayu, Paramita., Prabowo, H. Akbar. 2006. *Keuangan Publik : Teori dan Aplikasi*. Jakarta : LPKPAP. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keungan Departemen Keuangan RI.
- Gujarati, Damodar N., Dawn C. Porter. 2012. *Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi 5 Buku 1*. Jakarta Selatan: Salemba 47.
- Gujarati, Damodar N., Dawn C. Porter. 2013. *Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi 5 Buku 2*. Jakarta Selatan: Salemba 47.
- Heriqbaldi, Unggul. 2009. Konvergensi Tingkat Pendapatan Studi Kasus 3 Provinsi Di Pulau Jawa. *Journal of Indonesian Applied Economics*, Vol. 3 No. 1 Mei 2009, 77-88.
- Hidayat, M. Noor Sandi. Januari 2016. Analisis Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Jawa Timur: Studi Kasus 38 Kab/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Brawijaya*. Vol 4, No 1, 1-17.
- Isnaini, Dina. 2015. Pengaruh Tata Kelola Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pembangunan Daerah. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Kementerian Keuangan. 2010. *Grand Design Desentralisasi Fiskal di Indonesia*. Indonesia.

- Mankiw, N. Gregory. 2007. *Makroekonomi edisi keenam*. Jakarta: Salemba Empat.
- McGaw, Barry. 2008. *The Role of Human Capital in Long-Term Economic Growth*. Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) Journal, 89-98.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah: Good Governance, Democratization, Local Government financial Management*. Yogyakarta : Andi Offset
- Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana *Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* Vol 2, No 1, Mei 2006.
- Nachrowi, D dan Usman, Hardius. 2006. *Ekonometrika, untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT Grasindo.
- Osborne and Tanzi, V. 1996. Fiscal Federalism an Decentralization: A Review of Some Efficiency and Macroeconomic Aspect. *Annual World Bank Conference on Development Economics 1995*. World Bank. Washington DC.
- Pemerintah Provinsi Lampung. 2014. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2015-2019*. Bandar Lampung.
- Pemerintah Provinsi Lampung. 2015. *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2014*. Bandar Lampung.
- Pemerintah Provinsi Lampung. 2015. *Seri Analisis Pembangunan Wilayah Provinsi Lampung 2015*. Bandar Lampung.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13. 2006. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58. 2005. *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Purbadharmaja, I. B. Putu. Oktober 2010. *Implikasi Desentralisasi Fiskal dan Good Governance terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat* (Studi Kasus di Provinsi Bali). Disertasi Doktor. No 492/SP2H/PP/DP2M/VI/2010.
- Sasana, Hadi. Juni 2009. Peran Desentralisasi Fiskal terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol 10, No 1, 103-124.

- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Makro Ekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: raja Grafindo Persada.
- Supartoyo, Yesi H., Tatum, Jen., dan Sendouw, Recky H.E. Juli 2013. The Economic Growth and The Regional Characteristics: The Case of Indonesia. *Jurnal Ekonomi Moneter dan Perbankan*. JEL Classification 047, C23, R11. Bank Indonesia.
- Thiessen, Ulrich. 2001. *Fiscal Decentralisation & Economic Growth In High-Income OECD Countries*. European Network of Economic Policy Research Institutes Working Paper No. 1/January 2001.
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Ketujuh*. Jakarta : Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 32. 2004. *Tentang Pemerintahan Daerah*. Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 33. 2004. *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Republik Indonesia.
- United Nation Development Programme. 1990. *Human Development Report 1990*. UNDP. New York.
- Vazquez, M Jorge and McNab, M Robert. 2001. *Fiscal Desentralization & Economic Growth*, Working Paper #01-1, Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University.
- Widarjono, A, 2007. *Ekonometrika; Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis (2nd edition)*, Yogyakarta, Ekonisia.
- Winarno, Wing Wahyu. 2011. *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews Edisi 3*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Woller, Gary M. and Phillips, Kerk. 1998. Fiscal Decentralisation and LDC Economic Growth; An Empirical Investigation. *The Journal of Development Studies* Vol.34 (4).
- Zhang, Tao and Zou, Heng-fu. 1998. Fiscal Decentralization, Public Spending, and Economic Growth in China. *Journal of Public Economics* 67:221-240.
- Xie, D., Zou, H., and Davoodi, H. 1999. Fiscal Decentralization and Economic Growth in the United States. *Journal of Urban Economics*. 45:228-239.